

2021 

AUDITED

Akuntabel **Laporan Keuangan** KernenkeuTepercaya

• • • • **UAKPA**

Mengawal Pemulihan Ekonomi

Photo: Suku Dani, Papua

kanwildjkn17@kemenkeu.go.id



[kanwildjkn.papabaruku](#)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jayapura, 11 Mei 2022
Kepala Kantor Kanwil DJKN
Papua, Papua Barat dan Maluku

Ditandatangani secara elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP 19720902 199301 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	50



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 11 Mei 2022
Kepala Kantor Kanwil DJKN
Papua, Papua Barat, dan Maluku

Ditandatangani secara elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP 19720902 199301 1 001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 atau Tahun Anggaran (TA) 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp164.026.388 atau mencapai 0% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp2.207.124.569 atau mencapai 95,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.307.929.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021.

Nilai aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.640.272.833 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp42.676.540; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.589.571.643; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp8.024.650.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0. dan Rp3.640.272.833.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.645.188, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.247.370.175, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.229.724.987. Surplus Kegiatan Non

Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp148.396.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.081.328.987.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp3.678.503.639. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp2.081.328.987 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.043.098.181 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp3.640.272.833.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ini disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	164.026.388	0,00	7.675.508
JUMLAH PENDAPATAN		-	164.026.388	0,00	7.675.508
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	2.136.853.324
Belanja Barang	B.4	1.923.034.000	1.823.144.569	94,81	1.846.681.922
Belanja Modal	B.5	384.895.000	383.980.000	99,76	240.469.100
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		2.307.929.000	2.207.124.569	95,63	4.224.004.346

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	2.014.800	-
Persediaan	C.10	40.661.740	27.753.540
Jumlah Aset Lancar		42.676.540	27.753.540
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	3.886.702.309	4.027.774.801
Gedung dan Bangunan	C.16	3.309.082.000	3.309.082.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	85.055.000	85.055.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(3.691.267.666)	(3.779.186.352)
Jumlah Aset Tetap		3.589.571.643	3.642.725.449
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	764.389.760	1.574.767.465
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(756.365.110)	(1.566.742.815)
Jumlah Aset Lainnya		8.024.650	8.024.650
JUMLAH ASET		3.640.272.833	3.678.503.639
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.28	3.640.272.833	3.678.503.639
JUMLAH EKUITAS DANA		3.640.272.833	3.678.503.639
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.640.272.833	3.678.503.639

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	17.645.188	7.120.480
JUMLAH PENDAPATAN		17.645.188	7.120.480
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	2.132.169.105
Beban Persediaan	D.3	11.950.800	68.839.465
Beban Barang dan Jasa	D.4	970.350.072	976.008.640
Beban Pemeliharaan	D.5	144.022.001	196.521.050
Beban Perjalanan Dinas	D.6	683.913.496	606.008.232
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	437.133.806	387.616.318
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2.247.370.175	4.367.162.810
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.229.724.987)	(4.360.042.330)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		148.396.000	(23.962)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		148.396.000	(23.962)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.081.328.987)	(4.360.066.292)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.081.328.987)	(4.360.066.292)

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
EKUITAS AWAL	E.1	3.678.503.639	3.643.609.129
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.081.328.987)	(4.360.066.292)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENEYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.043.098.181	4.394.960.802
EKUITAS AKHIR	E.6	3.640.272.833	3.678.503.639

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

Dasar Hukum Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku
Entitas dan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk
Rencana Strategis meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006. Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Februari 2007 dan hingga saat ini Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berlokasi di Gedung Keuangan Negara Jayapura Lantai 7, yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Gurabesi, Kota Jayapura, bersama-sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Keuangan, telah dibentuk Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk kedua aplikasi tersebut sudah terkompilasi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan,

dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II diakui setelah disetor ke Kas Umum Negara.
 - Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji diakui setelah terbit SP2D untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji PNS.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah

perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 181/PMK.06/2018 sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan ATR berupa peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan ATR berupa gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum

tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja antara lain:

Uraian	TA 2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.392.660.000	1.923.034.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	384.895.000	384.895.000
Jumlah	2.777.555.000	2.307.929.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp164.026.388*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp164.026.388. Pendapatan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya, Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II, dan Pendapatan Denda Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2021

Uraian	TA 2021		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	14.720.000	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	133.676.000	
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	14.982.600	-
Pendapatan Denda Lainnya	0	647.788	-
Jumlah	0	164.026.388	-

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 2.227% dibandingkan TA 2020. Realisasi pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas II mengalami peningkatan sebesar 7.703% dibandingkan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN	148.396.000	6.378.480	2.227
Pendapatan Jasa Lainnya	0	550.000	(100)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan	14.982.600	192.000	7.703
Pendapatan Denda	647.788	-	-
Pendapatan Lain-lain	0	555.028	(100)
Jumlah	164.026.388	7.675.508	2.037

Realisasi Belanja Negara Rp2.207.124.569,-

B.2. Belanja

Realisasi belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp2.207.124.569 atau 95.63% dari anggaran belanja sebesar Rp2.307.929.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

URAIAN	TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.923.034.000	1.823.144.569	94,81
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	384.895.000	383.980.000	99,76
Total Belanja Kotor	2.307.929.000	2.207.124.569	95,63
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	2.307.929.000	2.207.124.569	95,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 48% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan sentralisasi belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN dan penurunan realisasi belanja barang pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	-	2.136.853.324	-100,00%
Belanja Barang	1.823.144.569	1.846.681.922	-1,27%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00%
Belanja Modal	383.980.000	240.469.100	59,68%
Jumlah	2.207.124.569	4.224.004.346	-47,75%

Belanja Pegawai

Rp0

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.136.853.324,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pembayaran belanja pegawai dilakukan secara terpusat melalui Kantor Pusat DJKN. Kebijakan tersebut berimplikasi pada realisasi belanja pegawai TA 2021 menjadi 0% dan penurunan sebesar 100% dari realisasi belanja TA 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 Dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	1.367.004.100	(100,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	23.424	(100,00)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	92.106.340	(100,00)
Belanja Tunj. Anak PNS	-	34.380.044	(100,00)
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	207.110.000	(100,00)
Belanja Tunj. PPh PNS	-	8.828.906	(100,00)
Belanja Tunj. Beras PNS	-	66.843.660	(100,00)
Belanja Uang Makan PNS	-	181.927.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	150.325.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	28.305.000	(100,00)
Belanja Lembur	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	2.136.853.474	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	150	(100,00)
Jumlah Belanja	-	2.136.853.324	(100,00)

Belanja Barang

Rp1.823.144.569

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.823.144.569 dan Rp1.846.681.922. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 1,27% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini antara lain disebabkan turunnya belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja persediaan, dan belanja pemeliharaan sepanjang TA 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	645.936.242	665.045.010	(2,87)
Belanja Barang Non Operasional	265.912.200	268.960.000	(1,13)
Belanja Jasa	58.501.630	42.003.630	39,28
Belanja Pemeliharaan	144.022.001	196.521.050	(26,71)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	683.913.496	610.809.561	11,97
Belanja Barang Persediaan	24.859.000	68.144.000	(63,52)
Jumlah Belanja Kotor	1.823.144.569	1.851.483.251	(1,53)
Pengembalian Belanja		(4.801.329)	(100,00)
Jumlah Belanja	1.823.144.569	1.846.681.922	(1,27)

Belanja Modal

Rp383.980.000

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp383.980.000 dan Rp240.469.100. Belanja

modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2020 sebesar 59,68%

Perbandingan Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	383.980.000	240.469.100	59,68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	383.980.000	240.469.100	59,68
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	383.980.000	240.469.100	59,68

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Belanja Modal Tanah pada TA 2021.

Perbandingan Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp383.980.000

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp383.980.000,-, mengalami kenaikan sebesar 59,68% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp240.469.100.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Mini Bus (14 penumpang kebawah)	313.000.000	-	
Alat Penghancur Kertas	8.800.000	-	
Alat Dapur Lainnya	7.300.000	-	0,00
Camera Digital	-	-	0,00
Genset	-	217.969.100	(100,00)
Tandon Air	44.980.000	22.500.000	99,91
Alat pemadam kebakaran	9.900.000	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	383.980.000	240.469.100	59,68
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	383.980.000	240.469.100	59,68

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.0*

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2021 dan 2020.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2021 dan 2020.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Lainnya pada TA 2021 dan 2020.

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
Belanja Modal Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Belanja Bantuan
Sosial
Rp0*

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2020. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyak daerah miskin.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TA 2021	TA 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau

kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas yang merupakan pendapatan Bunga Bank pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA 2021	TA 2020
- Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP

Rp0

C.4. Piutang PNBP

Saldo piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Keterangan	TA 2021	TA 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	TA 2021	TA 2020
1		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA

Rp0

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA

merupakan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TA 2021	2020
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar Rp0

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang

masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2021	TA 2020
-		-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp2.014.800,-

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.014.800,- dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	TA 2021	TA 2020
Pendapatan Masih Harus Diterima	2.014.800	-
Jumlah	2.014.800	-

Persediaan
Rp40.661.740

C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp40.661.740 dan Rp27.753.540. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	40.661.740	27.753.540
Jumlah	40.661.740	27.753.540

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2021	TA 2020
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TA 2021	TA 2020
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp0

C.14. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2021	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
Jumlah			-

Peralatan dan
Mesin
Rp3.886.702.309

C.15. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp3.886.702.309 dan Rp4.027.774.801. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	4.027.774.801
Mutasi tambah:	
Pembelian	383.980.000
Transfer Masuk	-
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	525.052.492
Saldo per 31 Desember 2021	3.886.702.309

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) sebesar Rp313.000.000,-;
- Pembelian Alat Penghancur Kertas sebesar Rp8.800.000,-;
- Pembelian Tandon Air sebesar Rp44.980.000,-;
- Pembelian Televisi sebesar Rp7.300.000,-;
- Pembelian Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp 9.900.000,-;

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) sebesar Rp165.000.000,-
- Lemari Besi/Metal sebesar Rp86.611.000,-
- Lemari Kayu sebesar Rp18.980.000,-
- Filling Cabinet Besi sebesar Rp52.402.000,-
- Meja Kerja Kayu sebesar Rp40.300.000,-
- Kursi Besi/Metal sebesar Rp85.549.992,-
- Uninterruptible Power Supply* (UPS) sebesar Rp72.710.000,-
- Printer sebesar Rp3.499.500,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp3.309.082.000*

C.16. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp3.309.082.000 dan Rp3.309.082.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	3.309.082.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Saldo per 31 Desember 2021	3.309.082.000

Tidak terdapat mutasi transaksi pengurangan gedung dan bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp85.055.000*

C.17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp85.055.000 dan Rp85.055.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	85.055.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Saldo per 31 Desember 2021	85.055.000

Tidak terdapat mutasi transaksi pengurangan jalan, irigasi, dan jaringan.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp3.691.267.666

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp3.691.267.666 dan Rp3.779.186.352. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.886.702.309	3.080.323.101	806.379.208
2	Gedung dan Bangunan	3.309.082.000	556.266.352	2.752.815.648
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.055.000	54.678.213	30.376.787
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	7.280.839.309	3.691.267.666	3.589.571.643

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.21. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Tidak ada transaksi penambahan atau pengurangan per 31 Desember 2021.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan
-	-
Jumlah	-

Aset Lain-lain
Rp764.389.760

C.22. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp764.389.760 dan Rp1.574.767.465. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	1.574.767.465
Mutasi tambah:	
- Koreksi	525.052.492
Mutasi kurang:	
- Koreksi	1.335.430.197
Saldo per 31 Desember 2021	764.389.760

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp756.365.110*

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.566.742.815 dan Rp1.566.742.815. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	764.389.760	756.365.110	8.024.650
	Jumlah	764.389.760	756.365.110	8.024.650

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp0*

C.24. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.25. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-
Total	-	-

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

C.26. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0

C.27. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Uraian	TA 2021	TA 2020
	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp3.640.272.833

C.28. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.640.272.833 dan Rp3.678.503.639. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Perubahan Ekuitas (Kenaikan/Penurunan)
Ekuitas	3.640.272.833	3.678.503.639	- 38.230.806
Jumlah	3.640.272.833	3.678.503.639	- 38.230.806

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp164.026.388,-

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp164.026.388,- dan Rp7.675.508,-. Pendapatan tersebut meningkat sebesar 2.037% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN	148.396.000	6.378.480	2.227
Pendapatan Jasa Lainnya	-	550.000	(100)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Keuangan	14.982.600	192.000	
Pendapatan Denda	647.788	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	555.028	
Jumlah	164.026.388	7.675.508	2.037

Pendapatan dari penjualan, pengelolaan bmn, iuran badan usaha berasal dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin serta pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, sementara pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan keuangan berasal dari pendapatan bea lelang oleh balai lelang/Pejabat Lelang Kelas II, terakhir pendapatan lain-lain yang berasal dari pendapatan denda lainnya per 31 Desember 2021.

Beban Pegawai
Rp0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.132.169.105. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	-	1.366.494.500	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	23.091	(100,00)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	92.071.220	(100,00)
Beban Tunj. Anak PNS	-	34.365.996	(100,00)
Beban Tunj. Struktural PNS	-	205.490.000	(100,00)
Beban Tunj. PPh PNS	-	8.798.788	(100,00)
Beban Tunj. Beras PNS	-	66.843.660	(100,00)
Beban Uang Makan PNS	-	181.927.000	(100,00)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	-	147.850.000	(100,00)
Beban Tunjangan Umum PNS	-	28.305.000	(100,00)
Beban Lembur	-	-	0,00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	(150)	(100,00)
Jumlah	-	2.132.169.105	(100,00)

Beban Persediaan
Rp11.950.800

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.950.800,- dan Rp68.839.465,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	11.950.800	68.839.465	(82,64)
Beban Perseidaiaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-	0,00
Jumlah	11.950.800	68.839.465	(82,64)

Beban Barang dan
Jasa
Rp970.350.072

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp970.350.072 dan Rp976.008.640. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi

atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya pengurangan pada Beban Bahan, Beban Honor Output Kegiatan, Beban Barang Non Operasional Lainnya, dan Beban Sewa. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	342.784.045	327.400.945	4,70
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	3.667.000	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Satuan Kerja	54.108.540	45.526.606	
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	98.013.657	101.499.459	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	102.960.000	126.540.000	(18,63)
Beban Barang Operasional Lainnya	48.070.000	60.411.000	(20,43)
Beban Bahan	42.062.200	27.210.000	54,58
Beban Honor Output Kegiatan	223.600.000	238.750.000	(6,35)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	250.000	3.000.000	(91,67)
Beban Langganan Telepon	213.630	213.630	0,00
Beban Sewa	-	18.000.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	7.200.000	5.400.000	33,33
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	51.088.000	18.390.000	177,80
Jumlah	970.350.072	976.008.640	(0,58)

Beban

Pemeliharaan

Rp144.022.001

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp144.022.001,- dan Rp196.521.050. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya perbedaan beban pemeliharaan peralatan dan mesin dengan tahun sebelumnya. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.022.001	196.521.050	(26,71)
Jumlah	144.022.001	196.521.050	(26,71)

*Beban Perjalanan Dinas
Rp683.913.496,-*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp683.913.496,- dan Rp606.008.232,-. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh menurunnya beban perjalanan biasa dan beban perjalanan dinas dalam kota. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	665.751.496	596.463.561	11,62
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.162.000	14.346.000	26,60
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	(4.801.329)	
Jumlah	683.913.496	606.008.232	12,86

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk

Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada kenaikan atau penurunan per 31 Desember 2021. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp437.133.806*

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp437.133.806 dan Rp387.616.318. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	304.636.626	254.264.659	19,81
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	120.346.466	120.346.465	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	12.150.714	12.150.714	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		854.480	
Jumlah Penyusutan	437.133.806	387.616.318	12,77
-	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	437.133.806	387.616.318	12,77

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2021 dan TA 2020

URAIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Nonlancar	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	0,00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp148.396.000

D.11. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	148.396.000	-	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	1.368.538	(100,00)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	(1.392.500)	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	148.396.000	(23.962)	(619397,22)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0,00
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1. Ekuitas Awal

Rp3.678.503.639

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.678.503.639 dan Rp3.643.609.129.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Awal	3.678.503.639	3.643.609.129
Jumlah	3.678.503.639	3.643.609.129

Defisit LO

E.2. Surplus (Defisit) LO

Rp2.081.328.987

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.081.328.987 dan Rp4.360.066.292. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Surplus(Defisit) LO	- 2.081.328.987	- 4.360.066.292
Jumlah	- 2.081.328.987	- 4.360.066.292

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar
Rp0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
-	-
Jumlah	-

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap
Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Gedung Garasi/Pool Permanen	-
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	-
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	-
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	-
Pagar Permanen	-
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	-
Jumlah	-

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-
lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp2.043.098.181

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.043.098.181 dan Rp4.394.960.802. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2021	2020	Naik (Turun) %
Ditagihkan Ke Entitas Lain	2.207.124.569	4.224.004.346	-48%
Diterima Dari Entitas Lain	(164.026.388)	(7.675.508)	2037%
Transfer Keluar	-	-	0%
Transfer Masuk	-	178.631.964	-100%
Jumlah	2.043.098.181	4.394.960.802	-54%

Ekuitas Akhir
Rp3.640.272.833

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.640.272.833 dan Rp3.678.503.639.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Perubahan Ekuitas (Kenaikan/Penurunan)
Ekuitas	3.640.272.833	3.678.503.639	- 38.230.806
Jumlah	3.640.272.833	3.678.503.639	- 38.230.806

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada bulan Agustus 2021 Kantor Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku mendapat tambahan pegawai sejumlah 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil. Penambahan SDM tersebut sangat dinanti-nanti karena dapat menunjang kinerja Kantor Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Akibat hal tersebut, terjadi penggantian Pejabat Pengelola yaitu sebagai berikut::

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	Kuasa Pengguna Anggaran	Arif Bintarto Yuwono	Nikodemus Sigit Rahardjo
	Pejabat Pembuat Komitmen	Aris Wibowo	Aris Wibowo
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Ashadi Nurcahyanto	Ashadi Nurcahyanto
	Bendahara Pengeluaran	Muhammad Rizqi Bhakti	Muhammad Rizqi Bhakti

LAMPIRAN DAN DAFTAR

A. Dokumen Pendukung Data Keuangan

1. Dokumen Pendukung Data Keuangan Tahun Anggaran 2021

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (3) Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020;
- (4) Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (7) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (8) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (9) Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (11) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (12) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun s.d. Bulan Desember 2021;
- (13) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 1 Januari 2021 (Saldo Awal);
- (14) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2021;
- (15) Neraca Percobaan Kas Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2021;
- (16) Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2021 dan 2020.

2. Dokumen Pendukung Data Keuangan Tahun Anggaran 2020

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;

- (2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (3) Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019;
- (4) Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (7) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (8) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (9) Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (11) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (12) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun s.d. Bulan Desember 2020;
- (13) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 1 Januari 2020 (Saldo Awal);
- (14) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2020;
- (15) Neraca Percobaan Kas Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2020;
- (16) Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Desember 2020 dan 2019.

B. Dokumen Pendukung Data Barang Milik Negara

1. Dokumen Pendukung Data Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021

- (1) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2021;
- (2) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (3) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;

- (4) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (5) Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (6) Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2021;
- (7) Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (8) Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (9) Laporan Barang Hibah DK/TP Yang Telah Diusulkan Proses Hibah Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (10) Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (11) Laporan Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (12) Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (13) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (14) Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (15) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 01 Januari 2021 (Saldo Awal);
- (16) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- (17) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2021;
- (18) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Tahun Anggaran 2021;
- (19) Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (20) Laporan Barang Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;

- (21) Rincian Realisasi Anggaran Belanja Kapitalisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021;
- (22) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021.

2. Dokumen Pendukung Data Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020

- (1) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2020;
- (2) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (3) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (4) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (5) Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (6) Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2020;
- (7) Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (8) Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (9) Laporan Barang Hibah DK/TP Yang Telah Diusulkan Proses Hibah Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (10) Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (11) Laporan Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (12) Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (13) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (14) Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;

- (15) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 01 Januari (Saldo Awal) Tahun Anggaran 2020;
- (16) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
- (17) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2020;
- (18) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Tahun Anggaran 2020;
- (19) Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (20) Laporan Barang Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (21) Rincian Realisasi Anggaran Belanja Kapitalisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020;
- (22) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020.